

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 94/PMK.07/2012
 TENTANG : PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 ATAS PENERIMAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT DATA DANA BAGI HASIL
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH

DATA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
 BERDASARKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara :

| No. | Daerah | Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan* | | | | | Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan** | | | | | Jumlah |
|-----|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| | | Sektor Perdesaan | Sektor Perkotaan | Sektor Perkebunan | Sektor Perhutanan | Sektor Pertambangan (Non Migas) | Sektor Perdesaan | Sektor Perkotaan | Sektor Perkebunan | Sektor Perhutanan | Sektor Pertambangan (Non Migas) | |
| 1 | Bagian Kabupaten A | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bagian Kabupaten B | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bagian Kabupaten C | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bagian Provinsi X | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

* Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian kabupaten/kota sebesar 64,8% dari penerimaan kabupaten/kota yang bersangkutan.

* Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian provinsi sebesar 16,2% dari penerimaan masing-masing kabupaten/kota.

** Biaya Pemungutan bagian provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan Surat Kuasa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
 NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO